

**PENDIDIKAN PEMILIH *INTEGRATED*: UPAYA MENGEMBANGKAN LITERASI POLITIK
PESERTA DIDIK SEBAGAI PRAPEMILIH***INTEGRATED VOTER EDUCATION: AN EFFORT TO DEVELOP STUDENTS' POLITICAL
LITERACY AS PRE-VOTERS*

Hariyanti*, Cecep Darmawan, Rahmat, Leni Anggraeni
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

Al Rafni, Suryanef
Universitas Negeri Padang
Jalan Prof. Dr. Hamka Padang 25171, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 07 Oktober 2024

Disetujui : 12 Maret 2025

Keywords:

voter education; integrated; political literacy; students; pre-voters

Kata Kunci:pendidikan pemilih; *integrated*; literasi politik; peserta didik; prapemilih***) Korespondensi:**

E-mail: hariyanti2023@upi.edu

Abstract: this study aims to describe the weaknesses of incidental voter education in improving political literacy and the integrated voter education model as a strategy for strengthening political literacy. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Informants in this study include Commissioners of the Pekanbaru City General Election Commission, Election Smart House Managers, and Pancasila and Civics Education Teachers in schools. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation studies. The data in this study are explained using the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that incidental education has proven ineffective in improving political welfare sustainably. Voter education in schools is generally only conducted in the lead-up to elections. Integrated voter education is a solution to prepare participatory pre-voters, possess adequate political literacy, and foster a spirit of volunteerism in safeguarding democracy through collaboration between the General Election Commission and Pancasila and Civics Education Teachers.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelemahan pendidikan pemilih insidental dalam meningkatkan literasi politik serta model pendidikan pemilih *integrated* sebagai strategi penguatan literasi politik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam kajian ini meliputi komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, pengelola rumah pintar pemilu, serta guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Data dalam kajian ini dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang bersifat insidental terbukti belum efektif dalam meningkatkan literasi politik secara berkelanjutan. Pendidikan pemilih di sekolah pada umumnya hanya dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih *integrated* sebagai solusi untuk mempersiapkan prapemilih yang partisipatif, memiliki literasi politik memadai, dan membentuk jiwa kerelawanan dalam mengawal demokrasi melalui kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud nyata dari penerapan konsep kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan harapan. Pemilu dianggap sebagai salah satu ciri esensial dari sistem politik demokrasi yang umumnya dianut oleh negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya berintegritas, karena sering diwarnai banyak kecurangan dan berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak sesuai kehendak rakyat. Integritas pemilu merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh negara demokrasi (Khoban, 2019; Rahmatunnisa, 2017) both in developed and mature democracies, as well as developing countries and still in transition to democracy. Nevertheless, the experience of many countries shows that elections are still marred by various violations and fraud (electoral malpractices. Merosotnya integritas pemilu tidak hanya disebabkan oleh buruknya kaderisasi dan seleksi partai politik dalam memilih kandidat, tetapi rendahnya literasi politik yang menyebabkan masyarakat terjebak dengan praktik kampanye hitam, hoaks, serta manipulasi politik (Hariyanti, Darmawan, & Masyitoh, 2018). Rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor utama penyebab menurunnya integritas pemilu.

Tingkat literasi politik khususnya dalam aspek kepemiluan dan demokrasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pendidikan pemilih yang dilakukan secara masif. Penyelenggara pemilu dan berbagai pihak terkait, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perguruan tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih yang fokus pada isu kepemiluan maupun demokrasi (Campbell, 2008; Hariyanti & Sari, 2021; Dock, Perdana, & Harmanto, 2023). Pemilu dan pendidikan pemilih merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses teknis semata, tetapi juga kualitas literasi politik masyarakat (Ridha & Riwanda, 2020). Pendidikan pemilih berkontribusi memperkuat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Pendidikan pemilih merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam

kehidupan berbangsa serta bernegara. Sasaran dari pendidikan pemilih yaitu warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau calon pemilih di masa mendatang. Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan partisipasi politik, literasi politik, serta sikap kerelawanan warga negara dalam mengawal demokrasi (Manik & Budhiati, 2015). Pendidikan pemilih tidak hanya menekankan pengetahuan seputar teknis tata cara pemberian suara, tetapi juga mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu (Dawkins, 2017; Hariyanti, 2015). Pendidikan pemilih menyeluruh dapat terwujud melalui kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam mengedukasi kelompok sasaran.

Kelompok sasaran jika ditujukan kepada prapemilih dalam kategori pelajar, maka dibutuhkan kolaborasi melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan guru PPKn sebagai sumber informasi utama terkait kepemiluan serta demokrasi. Peserta didik termasuk kategori prapemilih, yaitu kelompok usia yang belum memasuki usia pemilih tetapi dalam lima tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Regulasi batasan usia hak pilih di Indonesia yaitu minimal 17 tahun atau sudah menikah. Prapemilih menjadi kelompok sasaran strategis karena masih dalam fase pembentukan karakter dan pemikiran (Manik & Budhiati, 2015). Prapemilih harus dibekali sejak dini melalui pendekatan yang tepat agar menjadi pemilih cerdas, rasional, dan bertanggung jawab.

RPP merupakan pusat informasi kepemiluan bagi prapemilih yang dirancang oleh penyelenggara pemilu. RPP berada di kawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, provinsi, kabupaten atau kota sebagai pusat informasi kepemiluan masyarakat (Manik, Kamil, & Pamungkas, 2015). Penyelenggara pemilu di daerah harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan RPP sebagai pusat informasi kepemiluan, seperti melakukan kunjungan ke sekolah, radio, serta mengundang masyarakat untuk berpartisipasi langsung (Aprilia & Azmi, 2021). RPP jika dikembangkan secara optimal akan berpotensi menjadi layanan pendidikan pemilih yang tepat dan pusat pendidikan politik di tingkat kabupaten atau kota (Rafni & Suryanef, 2019). RPP berperan dalam membangun kesadaran politik prapemilih melalui pendekatan edukatif.

RPP dalam pelaksanaannya sebagai pusat pendidikan pemilih, mengalami beberapa kendala yaitu minimnya media pembelajaran kepemiluan untuk prapemilih. Kurangnya bahan sosialisasi yang tersedia dalam RPP menunjukkan perlu dilakukannya pembaruan informasi kepemiluan (Simbolon, 2019). RPP pada umumnya hanya dilengkapi dengan *marketplace* alur pelaksanaan pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan alat peraga simulasi, sedangkan materi yang disajikan hanya berupa pajangan informasi kepemiluan baku bersifat umum serta nasional. Kendala dalam pelaksanaan RPP lainnya yaitu belum ada kerjasama antara pengelola dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah melalui guru PPKn (Hariyanti, Hambali, & Eddison, 2022). RPP juga belum memiliki kurikulum pendidikan politik yang bersifat berkelanjutan dan *integrated*, serta program khusus untuk meningkatkan literasi politik prapemilih (Hariyanti, 2022). Rendahnya kunjungan ke RPP juga menjadi permasalahan akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta lokasi yang kurang strategis, karena berada jauh dari area persekolahan.

Penyelenggara pemilu jika menyoar kepada kategori prapemilih, maka dalam melaksanakan pendidikan pemilih harus berkolaborasi dengan guru PPKn. Materi kepemiluan dan demokrasi dalam pembelajaran PPKn masih diajarkan dengan metode konvensional, tanpa menggunakan media yang mendukung pemahaman peserta didik secara kontekstual serta menyenangkan. Model pembelajaran konvensional membuat peserta didik kebingungan, karena materi kepemiluan dan demokrasi hanya berupa konsep abstrak. Peserta didik merupakan kelompok prapemilih beberapa tahun kedepan, sehingga perlu dipersiapkan oleh guru untuk menjadi pemilih pemula cerdas, selektif, dan partisipatif. Pemilih pemula sering menjadi sasaran peserta pemilu pragmatis yang memanfaatkannya sebagai lumbung suara tanpa dibekali edukasi politik untuk menentukan pilihan secara cerdas (Indrajat dkk., 2020). Pendidikan pemilih sejak dini dibutuhkan bagi peserta didik sebagai prapemilih untuk menghadapi dinamika politik.

Potensi suara pemilih pemula seringkali tidak dikelola dengan baik melalui pendidikan pemilih yang sistematis dan komprehensif. Pendidikan pemilih oleh KPU selama ini cenderung bersifat insidental dan informatif

semata, belum dilakukan secara programatik (Setiawaty, 2014). Kehadiran RPP sebagai program prioritas KPU berfungsi menjadi pusat layanan pendidikan pemilih bagi prapemilih untuk memahami konsep kepemiluan dan demokrasi. RPP berpotensi menjadi sarana pemberi layanan pendidikan bagi pemilih pemula serta dapat dikembangkan sebagai media pendidikan politik di tingkat kabupaten atau kota (Rafni & Suryanef, 2019). Optimalisasi peran RPP sebagai pusat pendidikan pemilih menjadi fondasi dalam membina pemilih pemula.

Pendidikan pemilih seharusnya dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pendidikan pemilih mendorong kemandirian dan kebebasan warga negara dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, serta kepentingan politiknya. Program pendidikan pemilih bertujuan mendorong warga negara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warga negara jika berhadapan dengan pemerintahan (Rozuli & Haboddin, 2018). Pendidikan pemilih tidak hanya menjadi instrumen teknis menjelang pemilu, tetapi berperan membangun budaya demokrasi partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi oleh KPU terhadap pemilih muda pada praktiknya hanya dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu. Materi sosialisasi hanya menekankan aspek teknis pemilu, sedangkan isu politik yang kurang mendapat perhatian. KPU dalam menyampaikan materi terkait politik yang tidak memiliki bahan atau modul yang komprehensif, sehingga pemilih pemula hanya sebatas mengetahui cara menghindari tawaran dari kandidat. KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula belum menjelaskan secara menyeluruh terkait bentuk dari politik uang dan cara kerjanya (Harnom, Syahrizal, & Valentina, 2019). Perubahan sosial dimulai dari generasi muda yang responsif terhadap tren pemilu, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi generasi lanjut usia. Pemilih muda harus dipandang sebagai pendorong utama dinamika pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas dan arah perubahan politik (Rekker,

2022). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas terkait (1) kelemahan pendidikan pemilih insidental dalam meningkatkan literasi politik, serta (2) model pendidikan pemilih *integrated* sebagai strategi penguatan literasi politik.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai model pendidikan pemilih *integrated* sebagai solusi atas berbagai permasalahan dan kelemahan pendidikan politik saat ini. Penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Abdussamad, 2021; Fadli, 2021; Nuryadi & Widiatmaka, 2022). Kajian ini dilakukan di KPU Kota Pekanbaru dengan informan terdiri dari komisioner KPU Kota Pekanbaru, pengelola Rumah Pintar Pemilu (RPP), serta guru PPKn di sekolah. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Kajian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Pendidikan Pemilih Insidental dalam Meningkatkan Literasi Politik

Pendidikan pemilih insidental adalah pendidikan pemilih yang hanya dilakukan pada waktu menjelang penyelenggaraan pemilu. KPU biasanya melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula ke beberapa sekolah di wilayah kerjanya (Aprilia & Azmi, 2021). Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan literasi politik kepada pemilih pemula agar termotivasi dalam memberikan hak suara di TPS. Pendidikan pemilih selain diselenggarakan oleh pihak KPU, juga dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Bakesbangpol dengan mengundang komisioner sebagai narasumber. Komisioner KPU dapat diundang oleh pihak sekolah baik tingkat SMP dan SMA untuk menjadi narasumber kegiatan Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai bagian dari

pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan tema “suara demokrasi”. Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Pekanbaru secara keseluruhan masih bersifat insidental dan belum menunjukkan pola berkelanjutan.

KPU Kota Pekanbaru pada periode Agustus 2022 hingga November 2024 telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sebagian besar ditujukan kepada pemilih pemula di lembaga pendidikan serta masyarakat umum. Kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan dengan berbagai bentuk, seperti sosialisasi tatap muka, pemutaran film edukatif, kunjungan ke RPP, serta keikutsertaan sebagai narasumber pelaksanaan P5 di sekolah. Program “KPU Goes to School” menjadi salah satu inisiatif utama dalam menjangkau peserta didik di tingkat SMP, SMA, SMK, MA, dan sekolah inklusif seperti SLB Negeri Pembina Pekanbaru. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di pondok pesantren seperti Al Kifayah, Dar El Hikmah, dan Babussalam dengan pendekatan dialogis serta simulasi pemilu. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Riau dan Stikes PMC melalui program “KPU Goes to Campus”. KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih menyampaikan materi pentingnya partisipasi politik, prosedur menggunakan hak pilih, nilai-nilai demokrasi, dan etika politik yang relevan dengan konteks pelajar sebagai pemilih pemula.

KPU selain melaksanakan kegiatan di lembaga pendidikan, juga menasar masyarakat umum dan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kegiatan sosialisasi pilkada telah dilakukan di Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, dan Kecamatan Rumbai Barat melibatkan unsur kepala desa, camat, tokoh masyarakat, ketua PKK, organisasi kepemudaan, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Forum yang digelar oleh KPU salah satunya “*coffee morning*” bersama *stakeholder*, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan di Hotel Tjokro Pekanbaru bertujuan untuk membangun sinergi menciptakan pilkada damai. Kegiatan pendidikan pemilih di beberapa kecamatan, juga melibatkan kepala sekolah dan ketua OSIS untuk menyebarluaskan informasi kepada siswa. KPU juga ikut berperan sebagai narasumber P5 di beberapa sekolah dan mengintegrasikan isu kepemiluan dalam penguatan pendidikan karakter melalui pelatihan. Upaya edukatif

terkait pemilihan dan demokrasi menjangkau ruang kreatif seperti *Riau Creative Hub* (RCH) sebagai wadah interaktif penyampaian informasi kepada masyarakat umum.

Pendidikan pemilih yang bersifat insidental dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa cenderung dilakukan saat menjelang pemilu. Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan literasi politik warga negara yang nantinya akan memperkuat posisinya pada saat berhadapan atau mengikuti proses politik dan pemerintahan (Irawan, 2022; Rozuli & Haboddin, 2018). Pendidikan pemilih seharusnya tidak dilaksanakan secara insidental, tetapi harus melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti LSM, partai politik, komunitas, sekolah, guru, dan perguruan tinggi. Kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan dalam pendidikan pemilih karena mencerdaskan masyarakat secara politik tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu (Amsori, 2017). Pendidikan pemilih seharusnya menjadi upaya kolektif untuk membangun literasi politik prapemilih yang tidak terbatas pada masa pemilu.

Literasi politik merupakan suatu kesatuan yang utuh terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Literasi politik merupakan pemahaman praktis terkait konsep politik dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian informasi menjadi sarana penting dalam memahami seputar isu politik serta keyakinan para kontestan dan kecenderungannya mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain (Putri, 2017). Literasi politik merupakan kompetensi penting bagi setiap warga negara, terutama dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat (Sutisna, 2017). Perwujudan kedaulatan rakyat salah satunya yaitu hak untuk memilih pemimpin secara langsung melalui mekanisme pemilu. Warga negara harus memiliki kecerdasan politik agar dalam memberikan suara atau menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, bukan berdasarkan praktik kecurangan seperti manipulasi politik, hoaks, dan kampanye hitam (Abramovitz et al., 2019; Brady et al., 2010; Rosit et al., 2024). Literasi politik merupakan pengetahuan tentang proses dan isu-isu politik yang membuat warga negara menjalankan perannya secara efektif melalui partisipasi politik.

Warga negara dengan tingkat literasi politik yang baik akan berupaya mencermati

dan menganalisis isu-isu politik. Tingkat literasi politik yang baik membuat warga negara memiliki sudut pandang dan pendapat sendiri, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh opini para elit politik untuk meraih dukungan melalui manipulasi data maupun informasi (Bennett et al., 2009; Persson et al., 2016). Warga negara dengan literasi politik yang baik juga tidak akan mengalami kebingungan dalam memahami sistem pemilu, sehingga terhindar dari resiko menjadi bagian dari golongan putih akibat kurangnya informasi. Warga negara idealis dapat menjadi golongan putih karena tingginya pengetahuan dan informasi politik yang dimiliki tidak dibarengi oleh kesadaran moral untuk berpartisipasi (Bhatti, 2017; Ngozwana, 2017). Literasi politik merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki warga negara agar memiliki posisi kuat dalam sistem demokrasi (Putri, 2015). Warga negara dengan literasi politik yang baik tidak mudah terjebak dalam politik transaksional seperti jual beli suara atau dukungan pada saat pemilu.

Pendidikan pemilih bertujuan memperkuat literasi politik warga negara melalui pemberian edukasi tentang pemilihan dan demokrasi yang seharusnya tidak hanya dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih berkelanjutan dibutuhkan baik selama tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung maupun setelahnya. Pendidikan pemilih kepada masyarakat seperti di sekolah selama ini hanya gencar dilakukan menjelang pemilu karena keterbatasan anggaran meliputi akomodasi, konsumsi, serta teknis lainnya. KPU telah menetapkan strategi inovasi untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran yaitu mendirikan RPP sebagai pusat informasi pemilihan bagi masyarakat di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. RPP dirancang dengan berbagai fasilitas seperti ruang *display* data dan informasi pemilihan, ruang audio visual, ruang simulasi yang dilengkapi dengan replika TPS, serta ruang diskusi. RPP di Kota Pekanbaru tergolong representatif sesuai dengan pedoman, bahkan dilengkapi ruang *podcast* dan permainan ular tangga pemilihan raksasa pada ruang *display*. RPP di KPU Kabupaten Kampar telah menempati bangunan terpisah dari kantor staff, tetapi belum didesain secara maksimal karena masih digunakan sebagai aula pertemuan dan rapat. Keberadaan RPP dengan berbagai fasilitasnya bertujuan untuk memberikan

pengalaman nyata kepada pengunjung dalam memahami dan merasakan alur pemberian suara.

Pendidikan pemilih melalui RPP telah didukung dengan fasilitas informasi dan peralatan yang memadai. Kreativitas dan inovasi dari penyelenggara pemilu daerah dibutuhkan agar RPP menjadi pusat pendidikan pemilih yang berkelanjutan. RPP tidak akan efektif jika hanya pasif menunggu kunjungan, sementara informasi keberadaannya belum tersebar luas. Seorang guru PPKn SMA di Pekanbaru bahkan tidak mengetahui keberadaan RPP sebagai pusat informasi kepemiluan di KPU, karena kurangnya sosialisasi dan lemahnya kolaborasi dengan pihak terkait seperti sekolah, perguruan tinggi, komunitas, serta LSM. Berdasarkan data kunjungan ke RPP KPU Pekanbaru selama Agustus 2022 hingga Oktober 2023, tercatat hanya dua kunjungan dari institusi pendidikan yaitu SMAN 10 Pekanbaru dan Universitas Riau. Model pendidikan pemilih terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara KPU dan sekolah terutama peran guru PPKn dibutuhkan untuk membangun pendidikan pemilih berkelanjutan serta mempersiapkan peserta didik sebagai pemilih pemula dengan tingkat literasi politik baik.

KPU selama ini telah menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat secara terprogram, seperti program RPP, relawan demokrasi, serta kader desa peduli pemilu dan pemilihan. KPU juga telah melaksanakan pendidikan pemilih yang bersifat insidental seperti sosialisasi ke sekolah menjelang penyelenggaraan pemilu. Permasalahan yang dihadapi KPU yaitu program pendidikan politik cenderung tidak efektif dan berkelanjutan. Sejumlah program seperti relawan demokrasi hanya direkrut pada pemilu 2014 dan 2019, kader desa peduli pemilu dan pemilihan hanya aktif pada 2019, serta program rumah pintar pemilu yang minim pengunjung karena kurangnya sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak (Hambali, Hariyanti, & Eddison, 2023; Anggara, 2021; Tiowinanda, 2019). Penguatan strategi dan kolaborasi diperlukan dalam meningkatkan efektivitas dari pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih baik yang dilakukan secara terprogram atau bersifat insidental harus memuat beberapa kriteria. Pendidikan pemilih sebaiknya difokuskan pada satu segmen

pemilih tertentu agar materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan tingkat kognitif, latar belakang pendidikan sasaran, serta gaya komunikasi fasilitator. Kriteria kedua yaitu pendidikan pemilih harus dilakukan dengan menggandeng pihak terkait berdasarkan kelompok sasarannya. Pendidikan pemilih jika ditujukan kepada peserta didik, maka sebaiknya dilakukan kerjasama dengan sekolah atau perhimpunan guru bidang studi PPKn. Sekolah merupakan laboratorium demokrasi, sedangkan Mata Pelajaran PPKn merupakan media informasi mengenai kepemiluan dan demokrasi bagi peserta didik. PPKn bertujuan mendorong peserta didik menjadi warga negara yang partisipatif dalam lingkungan masyarakat (Branson, 2003; Treviño, et al., 2019; Yoldaş, 2015). Materi kepemiluan dan demokrasi yang termuat dalam PPKn memudahkan penyelenggara pemilu menginisiasi program pendidikan pemilih kedepannya.

Model Pendidikan Pemilih *Integrated* sebagai Strategi Penguatan Literasi Politik

Pendidikan pemilih *integrated* merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan pendidikan pemilih khususnya bagi peserta didik sebagai prapemilih. Pelaksanaan sosialisasi pemilu selama ini hanya menitikberatkan pada pemilih pemula saja, seharusnya diperlukan sistem untuk mempersiapkan prapemilih sejak dini yang cerdas dan partisipatif. Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali pertemuan dinilai tidak memadai, karena pemilih pemula sangat rentan terhadap hoaks, politik transaksional, pengaruh kelompok sebaya, manipulasi elit partai pragmatis. Literasi politik yang rendah menjadikan pemilih pemula lebih mudah terpengaruh informasi hoaks dan praktik politik tidak sehat (Ridha & Riwanda, 2020). Kerentanan pemilih pemula terhadap pengaruh negatif politik disebabkan oleh minimnya pengetahuan politik dan pengalaman pemilu yang dimiliki.

Pendidikan pemilih *integrated* menekankan kolaborasi antara KPU dan sekolah khususnya guru PPKn untuk mengedukasi peserta didik agar menjadi warga negara yang sadar akan hak serta kewajibannya. Pendidikan pemilih dalam kerangka PPKn bertujuan membangun literasi politik warga negara melalui penguatan tiga kompetensi utama meliputi *civic knowledge*, *civic disposition*, serta *civic skill* (Yanti, 2022).

Ketiga kompetensi kewarganegaraan dapat membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Pemahaman politik yang baik akan menumbuhkan kesadaran politik warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta membentuk sikap kritis terhadap persoalan sosial politik di sekitarnya (Branson, 1998; Galston, 2007). Keterlibatan PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler di jenjang sekolah menengah atas memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilu di masa mendatang (Ohme et al., 2020) societal actors frequently employ specific get-out-the-vote campaigns to mobilize young voters' turnout and engagement with the election. Although such campaigns receive praise in society, little is known about how effective they are and if they shape longer lasting types of political engagement. This study presents novel evidence about the differential effects of a multi-platform get-out-the-vote campaign in Denmark, and investigates how such campaigns can help to address the important democratic problem of youth disengagement. Based on a two-wave panel study among high school- and university students in Denmark (n = 275). PPKn berperan meningkatkan partisipasi politik dengan membekali peserta didik pengetahuan hak dan kewajiban warga negara, isu politik, serta kesadaran akan kepentingannya dalam pengambilan kebijakan (Siegel-Stechler, 2019). Sekolah dalam mendorong partisipasi politik peserta didik di masa depan harus meningkatkan pembelajaran dan pengetahuan kewarganegaraan.

PPKn bertujuan untuk meningkatkan literasi politik warga negara agar berpartisipasi memberikan suara dalam pemilu. PPKn diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pemuda melalui kegiatan diskusi, proyek komunitas, serta pemanfaatan informasi internet (Feldman et al., 2007). Guru PPKn harus diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran agar dapat mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari generasi muda dalam pemilu. Penggunaan hak pilih dalam pemilu sejatinya bukan salah satu tujuan PPKn, karena peserta didik yang memiliki tingkat literasi politik baik dapat memilih untuk tidak menggunakan suaranya jika merasa kurang sejalan dengan visi, misi, dan program dari kandidat (Giersch & Dong, 2018) education policy is slow to adopt the recommendations

of research and great variation exists within the United States in how schools deliver civics instruction. We hypothesize that when states make civics requirements more uniform and demanding, statewide civic participation among young people increases. Using state-level data about civic education requirements and voter registration and turnout from the Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE). Tujuan PPKn tidak akan tercapai jika warga negara menilai situasi politik tidak kondusif dan terjadinya pembusukan demokrasi, seperti yang terjadi di negara Zimbabwe. Rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik negara muncul akibat pengalaman peserta didik menyaksikan konflik politik dalam negeri, sehingga dapat memicu sikap apatis karena ketidakpercayaan terhadap politisi, institusi pemerintahan, serta kekecewaan terhadap proses demokrasi (Sigauke, 2012). Keterlibatan peserta didik dalam kajian tidak menjadi tolak ukur utama dari demokrasi atau bentuk kewarganegaraan yang baik, sehingga diperlukan strategi pembelajaran PPKn yang lebih transformatif.

KPU dan sekolah melalui pembelajaran PPKn memiliki hubungan yang saling menguntungkan karena memiliki tujuan sama yaitu meningkatkan literasi politik di kalangan warga negara muda. Model pendidikan pemilih *integrated* yang meliputi rancangan strategi pembelajaran, susunan materi, serta media pembelajaran ditujukan pada materi PPKn kelas XI dan XII. Materi pendidikan pemilih *integrated* disusun dalam bentuk *e-book* mencakup topik penting seperti konsep bangsa, negara, demokrasi, pendidikan politik, partai politik, pemilu dan pilkada, konsep pendidikan pemilih, sejarah pemilu di Indonesia, serta pembentukan sikap menjadi pemilih cerdas. Media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan pemilih *integrated* juga menawarkan permainan kartu pintar prapemilih cerdas untuk memberikan pengetahuan dasar seputar pemilu termasuk penyelenggara, jenis pelanggaran, macam-macam pemilu, syarat pemilih, serta ciri negara demokrasi. Media pembelajaran berupa permainan kartu pintar prapemilih cerdas juga memberikan pemahaman pentingnya menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan rasional, serta mengajak menjadi pemilih cerdas dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemula.

Guru PPKn dalam memberikan materi terkait kepemiluan dan demokrasi dapat menerapkan model pendidikan pemilih *integrated* dengan menggandeng KPU. Langkah-langkah pembelajaran PPKn menggunakan model pendidikan pemilih *integrated*, meliputi (1) peserta didik mendapatkan buku saku dalam bentuk *e-book*; (2) peserta didik menyimak penjelasan secara singkat dari guru mengenai tujuan, petunjuk penggunaan, dan kilasan isi buku saku; (3) peserta didik dibagi secara berkelompok terdiri dari lima orang per kelompok; (4) tiap kelompok membaca bagian materi yang berbeda dari buku saku; (5) peserta didik didampingi guru melakukan diskusi dan setiap anggota kelompok menjelaskan secara ringkas materi yang dibacanya dan melakukan tanya jawab; (6) peserta didik dipandu oleh guru untuk bermain kartu pintar prapemilih cerdas; (7) para pemain kartu pintar berasal dari perwakilan antar kelompok yang terdiri dari lima pemain; (8) peserta didik melakukan permainan kartu pintar prapemilih cerdas; (9) peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari melalui *e-book* dan permainan; serta (10) guru menginformasikan rencana kunjungan ke RPP di KPU kabupaten atau kota. Kegiatan pendidikan pemilih *integrated* diakhiri dengan kunjungan ke RPP untuk mendapatkan pengalaman nyata seputar praktik kepemiluan dan demokrasi.

Keunggulan model pendidikan pemilih *integrated* meliputi materi kepemiluan dan demokrasi menggunakan sumber belajar yang menarik dan mudah dipahami seperti *e-book* interaktif dengan bahasa sesuai keseharian peserta didik, permainan kartu pintar prapemilih cerdas, serta materi tidak bersifat abstrak karena diperkuat dengan pengalaman langsung berkunjung ke RPP. Kolaborasi antara KPU kabupaten atau kota dan guru PPKn memungkinkan program pendidikan pemilih dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat kepemiluan diajarkan tetapi juga momentum kepemiluan lainnya seperti masa sosialisasi pemilu di sekolah. KPU dapat berperan dalam kegiatan simulasi pemilu sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS yang dirancang menyerupai proses pemilu resmi sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi peserta didik. Model pendidikan pemilih *integrated* mampu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, dan berkelanjutan dalam membangun budaya demokrasi di sekolah.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi dari model pendidikan pemilih *integrated* meliputi diperlukan biaya tambahan untuk transportasi kunjungan ke RPP di KPU kabupaten atau kota dan percetakan kartu pintar prapemilih cerdas. Buku saku dalam bentuk *e-book* juga menuntut peserta didik membawa *handphone* dan memiliki akses internet yang dapat menjadi kendala di sekolah dengan keterbatasan fasilitas atau jaringan. Pelaksanaan kegiatan di luar sekolah memerlukan izin resmi yang tidak mudah didapatkan karena pertimbangan keamanan. Model pendidikan pemilih membutuhkan waktu tambahan di luar jam pelajaran PPKn dan kesediaan guru untuk mengelola proses pembelajaran agar lebih kompleks. Guru dituntut memiliki komitmen tinggi karena dalam model pendidikan pemilih *integrated* membutuhkan energi, waktu, biaya lebih, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan *handphone* agar pembelajaran tetap fokus.

Penerapan model pendidikan pemilih *integrated* membuat peserta didik menjadi lebih fokus membaca materi dalam buku saku, sedangkan guru dituntut untuk terus inisiatif dan kreatif agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Guru disarankan memberikan *ice breaking* karena dalam model pendidikan pemilih *integrated* banyak diberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca, saling berdiskusi, bermain kartu, hingga menyimpulkan materi. Peran guru PPKn tidak hanya sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak yang menjaga antusiasme peserta didik agar tetap terlibat aktif memahami nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam pemilu (Dock, Perdana, & Harmanto, 2023). Guru diharapkan tidak bersikap pasif sebagai pengawas semata agar proses pembelajaran dengan model pendidikan pemilih *integrated* tetap berjalan dinamis. Hubungan kerjasama yang solid antara KPU dan guru PPKn diperlukan untuk mendukung keberhasilan model pendidikan pemilih *integrated*.

SIMPULAN

Pendidikan pemilih yang bersifat insidental belum efektif meningkatkan literasi politik prapemilih secara berkelanjutan. Model pendidikan pemilih *integrated* sebagai solusi mempersiapkan prapemilih yang partisipatif, memiliki literasi politik memadai, serta membentuk

jiwa kerelawanan dalam mengawal demokrasi. Kolaborasi antara guru PPKn dan KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat penting, karena materi kepemiluan serta demokrasi terintegrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Model pendidikan pemilih *integrated* melalui produk buku saku dalam bentuk *e-book* dan media permainan kartu prapemilih cerdas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik di sekolah terkait kepemiluan serta demokrasi. RPP di KPU kabupaten atau kota juga dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi peserta didik dalam memahami kepemiluan, karena dilengkapi fasilitas ruang *display*, audio visual, simulasi, dan diskusi. Model Pendidikan pemilih *integrated* memiliki keunggulan, kekurangan, dan dampak pengelolaannya, sehingga diharapkan kedepannya dapat diterapkan secara optimal serta memberikan manfaat bagi proses berdemokrasi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abramovitz, M., Sherraden, M., Hill, K., Smith, T. R., Lewis, B., & Mizrahi, T. (2019). Voting is Social Work: Voices from the National Social Work Voter Mobilization Campaign. *Journal of Social Work Education*, 55(4), 626-644.
- Amsori. (2017). Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Guna Meningkatkan Partisipasi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. *Journal of Empowerment*, 1(1), 49-60.
- Anggara, B. S., & Suharno. (2021). Penguatan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul oleh Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 10(5), 478-488.
- Aprilia, C. R., & Azmi, A. (2021). Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 terhadap Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 4(1), 32-38.
- Bennett, W. L., Wells, C., & Rank, A. (2009). Young Citizens and Civic Learning: Two Paradigms of Citizenship in the Digital Age. *Citizenship Studies*, 13(2), 105-120.
- Bhatti, Y. (2017). Type of Education and Voter Turnout: Evidence from a Register-Based Panel. *Electoral Studies*, 49(1), 108-117.
- Brady, H. E., Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (2010). *A Resource Beyond Ses: Model of Political Participation*, 89(2), 271-294.
- Branson, M. (2003). *The Importance of Promoting Civic Education*. California: Center for Civic Education.
- Branson, M., & Quigley, C. (1998). *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. Washington, DC: Center for Civic Education.
- Campbell, D. E. (2008). Voice in the Classroom: How An Open Classroom Climate Fosters Political Engagement Among Adolescents. *Political Behavior*, 30(4), 437-454.
- Dawkins, R. (2017). Political Participation, Personality, and The Conditional Effect of Campaign Mobilization. *Electoral Studies*, 45(1), 100-109.
- Dock, C., Perdana, S. P., & Harmanto. (2023). Mempromosikan Demokrasi yang Berkelanjutan di Sekolah-Sekolah Kamboja melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 98-107.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Feldman, L., Pasek, J., Romer, D., & Jamieson, K. H. (2007). Identifying Best Practices in Civic Education: Lessons from The Student Voices Program. *American Journal of Education*, 114(1), 75-100.
- Galston, W. A. (2007). Civic Knowledge, Civic Education, and Civic Engagement: A Summary of Recent Research. *International Journal of Public Administration*, 30(7), 623-642.
- Giersch, J., & Dong, C. (2018). Required Civics Courses, Civics Exams, and Voter Turnout. *Social Science Journal*, 55(2), 160-170.
- Hambali, Hariyanti, & Eddison, A. (2023). Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat *Journal of Character Education Society*, 6(1), 46-57.
- Hariyanti. (2015). *Pelaksanaan Pendidikan Pemilih melalui Kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PKN SMA/MA*

- Kota Padang. Kota Padang: Universitas Negeri Padang.
- Hariyanti. (2022). Buku Saku Pendidikan Politik Bagi Prapemilih sebagai Upaya Mempersiapkan Pemilih Pemula yang Rasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 682-691.
- Hariyanti, Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74-85.
- Hariyanti, Hambali, Eddison, A., & Ariyanto, J. (2022). Pre-voters' Political Education Activities at the Election Smart House Amidst the Covid-19 Pandemic. *Journal of Etika Demokrasi*, 7(3), 416-427.
- Hariyanti, & Sari, F. A. (2021). Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility to Improve The Quality of Democracy. *Jurnal Etika Demokrasi*, 6(1), 1-11.
- Harnom, F., Syahrizal, S., & Valentina, T. R. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial dalam Memahami Bahaya Vote Broker oleh KPU. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 1-10.
- Indrajat, H., Warganegara, A., Kurniawan, R. C., & Kurniawan, B. (2020). *Pendidikan Pemilih Bagi Pemula dalam Menciptakan Pemilih Melek Politik di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung pada Pilkada Serentak 2020*. Artikel disajikan dalam Conference Series Community Engagement. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 19-31.
- Khoban, Z. (2019). What Citizens Learn from Elections: The Normative Consequences of Voter Eligibility. *Electoral Studies*, 62(December 2018), 102090. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102090>
- Manik, H. K., dkk. (2015). *Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Manik, H. K., & Budhiati, I. (2015). *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ngozwana, N. A. (2017). Civic Education in Lesotho: Implications for Teaching of Democratic Citizenship. *International Journal of Lifelong Education*, 36(5), 526-540.
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 101-109.
- Ohme, J., Marquart, F., & Kristensen, L. M. (2020). School Lessons, Social Media and Political Events in A Get-Out-The-Vote Campaign: Successful Drivers of Political Engagement Among Youth?. *Journal of Youth Studies*, 23(7), 886-908.
- Persson, M., Lindgren, K. O., & Oskarsson, S. (2016). How Does Education Affect Adolescents' Political Development?. *Economics of Education Review*, 53(1), 182-193.
- Putri, N. E. (2015). Peningkatan Literasi Politik melalui Kebijakan Berbasis Gender di Kabupaten Solok. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 5(1), 77-90.
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 5(1), 51-71.
- Rafni, A., & Suryanef. (2019). Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula melalui Rumah Pintar Pemilu. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 1-8.
- Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*. *Jurnal Bawashu*, 3(1), 1-8.
- Rekker, R. (2022). Young Trendsetters: How Young Voters Fuel Electoral Volatility. *Electoral Studies*, 75(2), 1-13.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110-121.
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2024). Penguatan Literasi Politik Warga dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*,

- 3(5), 1078-1088.
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi. *Politeia: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129-148.
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda melalui Pendidikan Politik yang Programatik. *Jurnal Islamic Review*, 3(1), 117-146.
- Siegel-Stechler, K. (2019). Is Civics Enough? High School Civics Education and Young Adult Voter Turnout. *Journal of Social Studies Research*, 43(3), 241-253.
- Sigauke, A. T. (2012). Young People, Citizenship and Citizenship Education in Zimbabwe. *International Journal of Educational Development*, 32(2), 214-223.
- Simbolon, Y. Y. (2019). Rumah Pintar Pemilu sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 4(1), 16-32.
- Sutisna, A. (2017). *Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual*. Artikel disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Tiowinanda, N. E. P. (2019). Efektivitas Program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang. *Kapita Selekta Geografi*, 2(12), 1-8.
- Treviño, E., Villalobos, C., Béjares, C., & Naranjo, E. (2019). Forms of Youth Political Participation and Educational System: The Role of The School for 8th Grade Students in Chile. *Young*, 27(3), 279-303.
- Yanti, S. R. (2022). Studi Perbandingan Pembentukan Civic Disposition Antara Siswa Laki-Laki dan Perempuan pada Pembelajaran PKn di SMP Negeri 2 Lirik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6658-6668.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 174(286), 544-549.